

**HUBUNGAN EFEKTIVITAS SISTEM CAT DENGAN TINGKAT
KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP SELEKSI CPNS DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Tugas Skripsi)

Oleh

Farah Diba Putri Khotima

NPM 2416041103



PROGRAM STUDI ILMU ADMNISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

II. TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangat penting untuk melihat bagaimana topik efektivitas sistem CAT dan kepercayaan masyarakat terhadap seleksi CPNS telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Dari berbagai penelitian, dapat dilihat bahwa fokus utamanya terbagi menjadi dua: penelitian yang menyoroti efektivitas sistem CAT sebagai instrumen seleksi ASN, dan penelitian yang menekankan pada persepsi atau kepercayaan masyarakat terhadap transparansi birokrasi.

Penelitian Maharani, Kurniawan, & Putra (2024) meneliti transparansi rekrutmen ASN berbasis CAT di UPT BKN Padang dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem CAT dipandang cukup transparan oleh peserta, namun masyarakat masih mempertanyakan tahap pasca-CAT yang dianggap membuka ruang intervensi non-meritokratis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas CAT masih belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hafiz (2019) dalam skripsinya di UIN Jakarta menyoroti kebijakan penggunaan CAT dalam perspektif *good governance*. Penelitian ini menegaskan bahwa CAT secara teknis mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rekrutmen ASN, namun efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi prinsip *good governance*, khususnya pada tahap lanjutan setelah tes CAT.

Penelitian oleh Suryani (2021) dalam Jurnal Borneo Administrasi mengevaluasi implementasi CAT di Indonesia dengan menekankan kesiapan infrastruktur, kualitas soal, serta pelaksanaan ujian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun CAT meningkatkan objektivitas, kelemahan dalam sarana dan pengawasan teknis masih bisa memengaruhi kepercayaan peserta.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem CAT pada dasarnya efektif dalam meningkatkan transparansi seleksi CPNS. Namun, tingkat

kepercayaan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan CAT itu sendiri, melainkan juga oleh tahap lanjutan rekrutmen dan konsistensi pemerintah dalam menerapkan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian untuk mengkaji hubungan antara efektivitas sistem CAT dengan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian, Persamaan, & Perbedaan
Maharani, Kurniawan, & Putra (2024)	Transparansi Rekrutmen ASN Berbasis CAT: Studi Persepsi Masyarakat di UPT BKN Padang	CAT dinilai transparan karena nilai bisa diketahui langsung, tetapi tahap pasca-CAT masih dipandang rawan intervensi non-meritokratis. Sama-sama meneliti CAT dan hubungannya dengan persepsi/kepercayaan masyarakat. Penelitian ini fokus di UPT BKN Padang, sedangkan penelitian saya fokus di Kota Bandar Lampung.
Muhammad Reza Hafiz (2019)	Kebijakan CAT terhadap Penerimaan CPNS dalam Perspektif Good Governance	CAT meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seleksi CPNS, namun efektivitas kebijakan sangat bergantung pada

		konsistensi prinsip good governance. Sama-sama membahas efektivitas CAT dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas seleksi ASN. Hafiz menekankan perspektif good governance, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada hubungan CAT dengan kepercayaan masyarakat.
Suryani (2021)	Evaluasi Implementasi Computer Assisted Test (CAT) dalam Seleksi CPNS di Indonesia	CAT terbukti meningkatkan objektivitas seleksi, namun masih ada kendala teknis seperti infrastruktur dan pengawasan. Sama-sama menilai efektivitas CAT dalam seleksi CPNS. Suryani fokus pada evaluasi teknis pelaksanaan CAT, sedangkan penelitian saya menghubungkannya dengan trust masyarakat di Bandar Lampung.

Andri Saputra (2018)	Efektivitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah Lampung	Efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, dan akuntabilitas. Sama-sama membahas efektivitas birokrasi di Lampung. Andri meneliti pelayanan publik secara umum, sedangkan penelitian saya spesifik pada efektivitas CAT dalam seleksi CPNS.
----------------------	---	--

Sumber: Diolah dari Maharani et al. (2024), Hafiz (2019), Suryani (2021), dan Andri Saputra (2018).

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas sistem Computer Assisted Test (CAT) maupun persepsi masyarakat terhadap seleksi CPNS. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani, Kurniawan, & Putra (2024) misalnya, menunjukkan bahwa meskipun CAT dianggap transparan, masyarakat masih memiliki keraguan terhadap tahapan pasca-CAT yang dinilai membuka ruang intervensi non-meritokratis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muhammad Reza Hafiz (2019) yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan CAT tidak hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari sejauh mana prinsip good governance dijalankan secara konsisten.

Selanjutnya, penelitian Suryani (2021) menyoroti efektivitas CAT dari aspek teknis, terutama kesiapan infrastruktur dan mekanisme pengawasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem ini memang meningkatkan objektivitas,

tetapi kendala teknis berpotensi memengaruhi kepercayaan peserta terhadap seleksi.

Di sisi lain, penelitian Andri Saputra (2018) lebih menitikberatkan pada efektivitas pelayanan publik di pemerintah daerah Lampung secara umum. Penelitiannya relevan dalam memberikan kerangka teoretis mengenai efektivitas birokrasi, tetapi belum secara khusus menyoroti sistem rekrutmen berbasis CAT.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem CAT pada dasarnya dianggap mampu meningkatkan transparansi dan objektivitas seleksi CPNS. Namun, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti isu nepotisme atau kendala teknis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji efektivitas sistem CAT dan persepsi publik. Perbedaannya, penelitian ini secara spesifik akan meneliti hubungan antara efektivitas sistem CAT dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seleksi CPNS di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi research gap yang belum banyak diteliti pada level lokal, terutama dalam konteks birokrasi di Bandar Lampung.

2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektivitas berasal dari kata *effective* yang berarti berhasil guna atau mencapai hasil yang diharapkan. Dalam konteks administrasi publik, efektivitas dipahami sebagai ukuran sejauh mana suatu kebijakan, program, atau organisasi mampu mewujudkan tujuan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Efektivitas organisasi dapat dimaknai sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi melalui penggunaan sumber daya secara tepat. Dengan demikian, efektivitas berfokus pada *goal achievement*, yaitu apakah organisasi benar-benar berhasil mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pemahaman serupa juga

dikemukakan oleh Parsons (1951) melalui *Goal Attainment Theory*, yang menjelaskan bahwa suatu sistem hanya dapat disebut efektif apabila berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena tujuan merupakan elemen mendasar yang mengarahkan tindakan dalam organisasi.

Sementara itu, Yuchtman dan Seashore melihat efektivitas dari sudut pandang kemampuan organisasi untuk memperoleh serta memanfaatkan sumber daya dari lingkungannya. Artinya, efektivitas tidak hanya diukur dari hasil akhir atau output, melainkan juga dari bagaimana organisasi menjaga keberlangsungan dengan menjalin interaksi yang baik dengan lingkungannya. Melalui *system theory* menekankan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh keseimbangan yang terjalin antara input, proses, dan output. Jika seluruh tahapan tersebut berjalan dengan baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai dengan optimal.

Dalam konteks birokrasi di Indonesia, Dwiyanto (2018) menyatakan bahwa efektivitas pelayanan publik bukan hanya dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dari kualitas pelayanan, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, akuntabilitas birokrasi, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya menyangkut keberhasilan teknis, tetapi juga legitimasi birokrasi di mata masyarakat. (Maharani et al., 2024) menekankan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan dengan memperhatikan hubungan antara input dan output serta kejelasan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Lebih lanjut, efektivitas dalam administrasi publik tidak dapat dilepaskan dari prinsip *good governance*. Hafiz (2019) dalam penelitiannya mengenai kebijakan CAT menegaskan bahwa efektivitas seleksi ASN bukan hanya diukur dari tercapainya tahapan teknis rekrutmen, melainkan juga dari bagaimana proses tersebut mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi. Oleh sebab itu, efektivitas harus dipahami secara multidimensional, yakni keberhasilan dalam menjalankan prosedur sekaligus keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik terhadap hasil yang diperoleh.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan konsep yang menekankan ketercapaian tujuan organisasi atau kebijakan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, keseimbangan dalam proses, serta legitimasi di mata masyarakat. Dalam penelitian ini, efektivitas sistem Computer Assisted Test (CAT) dimaknai sebagai sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan utama rekrutmen aparatur sipil negara, yaitu menciptakan seleksi yang transparan, akuntabel, objektif, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.

2.3 Konsep Sistem Computer Assisted Test (CAT)

Sistem *Computer Assisted Test* (CAT) merupakan inovasi penting dalam reformasi birokrasi Indonesia, khususnya dalam proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sistem ini dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat terhadap proses seleksi aparatur yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2022), penerapan CAT dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasil seleksi CPNS benar-benar mencerminkan kemampuan peserta, bukan karena intervensi pihak tertentu.

CAT pertama kali diterapkan secara nasional pada tahun 2013 dan hingga kini menjadi metode utama dalam seleksi CPNS. Sistem ini berbasis komputer sehingga hasil ujian dapat diketahui secara langsung (*real time scoring*) begitu peserta menyelesaikan tes. Keunggulan lain dari CAT adalah bank soal yang diacak secara otomatis, sehingga setiap peserta mendapatkan paket soal yang berbeda. Mekanisme ini tidak hanya menekan kemungkinan terjadinya kebocoran soal, tetapi juga menjamin objektivitas karena seluruh peserta menghadapi tingkat kesulitan soal yang relatif sama (BKN, 2023).

Selain itu, CAT juga didukung dengan sistem pengawasan digital yang semakin canggih. Pada seleksi CPNS 2024, misalnya, BKN menerapkan teknologi *face recognition* untuk memastikan identitas peserta sesuai dengan data pendaftaran. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah praktik perjurian yang sempat marak pada periode sebelumnya (Antara News, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas CAT dalam mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat masih menghadapi tantangan. Beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya bebas dari penyalahgunaan. Misalnya, pada tahun 2024 terjadi kasus dugaan joki CPNS di Lampung yang diproses oleh aparat penegak hukum (Kupastuntas.co, 2024). Kasus tersebut memperlihatkan bahwa meskipun sistem CAT telah dirancang transparan, masih terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oknum tertentu untuk melakukan kecurangan.

Dari perspektif akademis, penerapan CAT dapat dipahami melalui kerangka teori *merit system* yang menekankan bahwa pengangkatan pegawai harus didasarkan pada kompetensi, bukan faktor koneksi atau nepotisme (Riggs, 1964; Thoha, 2012). Dengan menggunakan teknologi digital, CAT berupaya menegakkan prinsip meritokrasi melalui penyaringan objektif yang berbasis skor. Namun, teori efektivitas organisasi (Steers, 1985) juga menegaskan bahwa efektivitas tidak hanya diukur dari keberhasilan teknis pelaksanaan, melainkan juga dari tingkat penerimaan publik terhadap sistem tersebut. Artinya, meskipun CAT secara prosedural sudah baik, sistem ini baru bisa disebut efektif jika masyarakat percaya bahwa hasil seleksi benar-benar mencerminkan keadilan dan integritas birokrasi.

Dalam konteks kepercayaan publik, Fukuyama (1995) menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang dibangun melalui konsistensi dan integritas institusi. Hal ini relevan dengan CAT, di mana legitimasi birokrasi sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menilai kejujuran dan transparansi proses seleksi ASN. Jika sistem CAT dianggap mampu menutup celah manipulasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap seleksi CPNS akan meningkat. Sebaliknya, jika masih terdapat kasus joki, kecurangan, atau dugaan “orang dalam”, maka tingkat kepercayaan publik bisa melemah meskipun secara teknis CAT berjalan baik.

Dengan demikian, konsep sistem CAT dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen digital dalam seleksi CPNS yang dirancang untuk mewujudkan rekrutmen aparatur berbasis meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada aspek teknis seperti *real time*

scoring, pengacakan soal, dan pengawasan digital, tetapi juga pada persepsi masyarakat mengenai keadilan proses seleksi. Oleh karena itu, efektivitas CAT harus selalu dilihat dalam kaitannya dengan kepercayaan masyarakat sebagai bentuk legitimasi terhadap birokrasi negara.

Konsep Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat (*public trust*) merupakan keyakinan bahwa institusi publik akan menjalankan tugasnya dengan jujur, transparan, dan konsisten. Dalam administrasi publik, trust dipandang sebagai indikator penting legitimasi birokrasi, karena tanpa kepercayaan masyarakat, kebijakan atau program pemerintah sulit diterima secara luas.

Penelitian terbaru menegaskan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui kombinasi antara kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan etika administrasi. Ifatul Latifah, Wardani, & Hayat (2025) menyoroti bahwa etika pemerintahan yang meliputi transparansi, regulasi yang jelas, dan partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik. Etika yang baik menciptakan persepsi positif bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu (*Jurnal ITTC*).

Studi kuantitatif oleh Shofie Azizah, Kholifah, & Pratama (2024) juga menemukan bahwa kualitas layanan publik dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Menariknya, transparansi saja tidak selalu berdampak besar jika tidak didukung oleh akuntabilitas yang nyata. Artinya, kepercayaan publik terbentuk ketika masyarakat tidak hanya diberikan informasi terbuka, tetapi juga melihat adanya tanggung jawab dan integritas dalam pelaksanaan kebijakan (*SINOMIKA Journal*).

Lebih lanjut, Susila, Shaliha, & Hayat (2024) menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai etika administrasi publik, seperti integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, dapat meningkatkan reputasi pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah (*Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*). Sejalan dengan itu, Azhary dkk. (2023/2024) menegaskan bahwa komunikasi publik yang

terbuka, transparan, dan responsif melalui strategi *public relations* mampu membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat dan memperkuat trust (*Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*).

Dalam konteks seleksi CPNS di Kota Bandar Lampung, konsep kepercayaan masyarakat ini dapat dilihat dari persepsi publik terhadap sejauh mana sistem Computer Assisted Test (CAT) dilaksanakan secara objektif dan bebas dari intervensi. Indikator kepercayaan masyarakat mencakup:

1. Keyakinan bahwa proses seleksi bebas dari praktik kecurangan atau nepotisme.
2. Persepsi terhadap transparansi hasil seleksi yang diumumkan secara terbuka.
3. Penilaian terhadap konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip merit system.
4. Respons pemerintah terhadap keluhan atau sanggahan dari peserta seleksi.

Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap seleksi CPNS di Bandar Lampung sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah mampu menegakkan integritas, menjaga transparansi, serta memberikan layanan publik yang berkualitas dalam setiap tahapan seleksi.

2.4. Konsep Seleksi CPNS

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu instrumen strategis dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Proses seleksi ini diselenggarakan pemerintah untuk menjaring calon aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Dasar hukum seleksi CPNS mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menegaskan bahwa rekrutmen ASN harus dilakukan berdasarkan prinsip *merit system*. Prinsip ini menempatkan individu pada jabatan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerjanya, sehingga peluang nepotisme, kolusi, dan intervensi politik dapat diminimalisir.

Menurut Thoha (2012), *merit system* merupakan instrumen utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan penerapan sistem ini, pengisian jabatan tidak lagi didasarkan pada hubungan kekerabatan atau kedekatan dengan penguasa, melainkan pada kriteria objektif yang terukur. Sistem Computer Assisted Test (CAT) kemudian dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nyata dari *merit system*, karena hasil seleksi ditentukan sepenuhnya oleh kemampuan peserta yang tercermin dari nilai ujian yang diperoleh secara langsung.

Penerapan CAT dalam seleksi CPNS bertujuan untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses rekrutmen. Peserta dapat mengetahui hasil ujian secara *real time* setelah menyelesaikan tes, sementara soal diacak otomatis sehingga setiap peserta menghadapi tantangan yang setara. Mekanisme ini dirancang untuk menghapus persepsi adanya intervensi pihak tertentu dalam penentuan kelulusan. Dengan demikian, seleksi CPNS berbasis CAT bukan hanya sarana teknis rekrutmen, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan meritokratis.

Namun demikian, efektivitas sistem CAT dalam menjamin objektivitas masih menghadapi tantangan. Beberapa kasus kecurangan seleksi CPNS yang muncul di Lampung, misalnya kasus joki CPNS dan dugaan manipulasi hasil tes (Metrotvnews.com, 2024; RRI.co.id, 2024), memperlihatkan bahwa meskipun sistem CAT telah memperkuat transparansi, ruang bagi praktik curang tetap ada. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai sejauh mana efektivitas CAT benar-benar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di tingkat lokal seperti Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian, dalam penelitian ini seleksi CPNS dipahami bukan hanya sebagai proses administratif untuk menjaring aparatur negara, melainkan juga sebagai instrumen untuk membangun legitimasi birokrasi melalui prinsip meritokrasi. Efektivitas CAT dalam seleksi CPNS menjadi titik penting untuk mengukur kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, karena masyarakat

cenderung menilai integritas pemerintah dari bagaimana proses rekrutmen dijalankan secara adil dan transparan.

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun atas dasar teori efektivitas organisasi, konsep sistem Computer Assisted Test (CAT), serta teori kepercayaan masyarakat dalam administrasi publik.

Sistem CAT merupakan instrumen digital yang didesain untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas dalam seleksi CPNS (LAN, 2022). Efektivitas CAT dapat dilihat dari sejauh mana sistem ini mampu mencapai tujuan merit system, seperti meminimalisasi kecurangan, menjamin kesetaraan peserta, serta memberikan hasil yang cepat dan akurat (Maharani et al., 2024).

Di sisi lain, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial penting yang menunjukkan legitimasi birokrasi di mata publik. Penelitian terbaru (Latifah et al., 2025; Azizah et al., 2024; Susila et al., 2024) menegaskan bahwa trust dipengaruhi oleh etika administrasi, kualitas layanan, akuntabilitas, serta komunikasi publik yang transparan.

Dengan demikian, logika hubungan yang dibangun dalam penelitian ini adalah: semakin efektif sistem CAT dalam mewujudkan seleksi CPNS yang objektif, transparan, dan akuntabel, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi CPNS di Kota Bandar Lampung. Sebaliknya, apabila efektivitas CAT terganggu oleh praktik kecurangan, nepotisme, atau ketidakjelasan dalam tahap lanjutan seleksi, maka kepercayaan masyarakat akan menurun.

Efektivitas Sistem CAT (X)

Indikator:

- Transparansi nilai ujian (real-time scoring)
- Objektivitas soal (acak & standar nasional)
- Akuntabilitas pelaksanaan (pengawasan BKN & panitia)
- Minim kecurangan (teknologi face recognition, anti-joki)
- Kepuasan peserta (persepsi adil & setara)



(Semakin efektif CAT)

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat (Y)

Indikator:

- Keyakinan seleksi bebas KKN & nepotisme
- Persepsi transparansi hasil seleksi
- Konsistensi penerapan merit system
- Respons pemerintah terhadap sanggah/keluhan peserta
- Citra positif birokrasi di mata publik



(Jika efektivitas CAT rendah)

Kepercayaan masyarakat akan menurun, muncul persepsi negatif (isu joki, “jalur orang dalam”)

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S., Al Rosyadah, H. K., & Pratama, V. Y. (2024). Kualitas layanan publik, transparansi, dan akuntabilitas sebagai faktor penentu kepercayaan masyarakat. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 45–57.
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hafiz, M. R. (2019). *Kebijakan Computer Assisted Test (CAT) terhadap penerimaan CPNS dalam perspektif good governance* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Latifah, I., Wardani, S. A., & Hayat. (2025). Peran etika dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik*, 5(1), 11–25.
- Lembaga Administrasi Negara. (2022). *Laporan kinerja instansi pemerintah: Penerapan sistem CAT dalam seleksi CPNS*. Jakarta: LAN RI.
- Maharani, D., Kurniawan, R., & Putra, F. (2024). Transparansi rekrutmen ASN berbasis Computer Assisted Test (CAT): Studi persepsi masyarakat di UPT BKN Padang. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, 4(3), 540–553.
- Saputra, A. (2020). *Analisis efektivitas penerapan sistem Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi di BKN Regional XIII Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas organisasi* (Terjemahan Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.
- Susila, B. D. A., Shaliha, S., & Hayat. (2024). Membangun kepercayaan: Peran etika administrasi publik terhadap kepercayaan publik pada instansi pemerintah. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(1), 77–89.
- Thoha, M. (2012). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.